

MODUL

TAGGING ANGGARAN PEMBANGUNAN LANSKAP LESTARI

2026

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) – Provinsi Riau

Tim Penyusun:

1. **Romagia, M.Si**
2. **Tarmidzi, MH**
3. **Gusmansyah, M.IP**
4. **Sartika Dewi, S.Pd**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Modul Tagging Anggaran Pembangunan Lanskap Lestari ini dapat diselesaikan. Modul ini disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pembangunan lanskap yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Lanskap lestari merupakan pendekatan tata kelola wilayah yang mengintegrasikan tiga pilar utama: perlindungan lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Siak dan Pelalawan, sebagai wilayah yang memiliki bentang alam penting berupa hutan, lahan gambut, daerah aliran sungai, dan kawasan budidaya, memerlukan kebijakan pembangunan yang mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya pelestarian lingkungan.

Modul ini dirancang sebagai panduan praktis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan mitra pembangunan dalam melakukan tagging anggaran. Melalui pendekatan Climate Budget Tagging (CBT), modul ini menyediakan metode dan kriteria yang sistematis untuk mengidentifikasi program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang berkontribusi terhadap perlindungan ekosistem, pengelolaan gambut dan daerah aliran sungai, pertanian dan perkebunan berkelanjutan, ekonomi hijau, serta tata kelola lingkungan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran utuh mengenai besaran investasi daerah pada berbagai aspek pembangunan lanskap, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang lebih tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini, khususnya kepada Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau, para narasumber, mitra pembangunan, dan pemerintah daerah Kabupaten Siak dan Pelalawan yang telah memberikan dukungan serta masukan berharga.

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong tata kelola anggaran yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada pembangunan lanskap yang lestari di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. Akhir kata, kami berharap modul ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, tangguh, dan ramah lingkungan.

TIM PENYUSUN

CARA MEMAHAMI MODUL

Modul ini disusun sebagai panduan praktis yang dapat digunakan secara mandiri maupun dalam kelompok kerja lintas sektor. Agar pembaca dapat memanfaatkan modul secara optimal, penting untuk memahami terlebih dahulu alur, struktur, dan cara membaca setiap bagian. Sub bab ini akan menjelaskan bagaimana modul ini diorganisasikan serta bagaimana setiap komponennya saling terkait dalam proses tagging anggaran lanskap lestari.

1. Struktur Modul

Modul terdiri dari empat bagian utama yang disusun secara berurutan untuk memandu pengguna dari pemahaman konsep hingga penerapan teknis:

Bab	Judul	Isi Utama
I	Pendahuluan	Latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan sasaran pengguna modul
II	Konsep Dasar Lanskap Lestari	Sejarah, pengertian, prinsip, dan indikator lanskap lestari
III	Cara Menggunakan Modul Tagging	Metodologi, definisi operasional, matriks penilaian, kamus tagging, dan langkah-langkah penerapan
IV (Lampiran)	Contoh Penerapan	Studi kasus hipotetis yang menunjukkan proses penilaian skor, perhitungan tag, dan rekapitulasi hasil

Setiap Bab memiliki fungsi yang saling melengkapi. Bab I memberikan kerangka umum dan alasan mengapa modul ini diperlukan. Bab II membangun landasan teoretis dan konseptual yang menjadi dasar penilaian. Bab III merupakan inti praktis dari modul, berisi alat dan prosedur yang langsung dapat digunakan. Lampiran memberikan ilustrasi nyata untuk memperjelas setiap langkah yang dijelaskan di Bab III.

2. Simbol dan Penekanan Penting

Sepanjang modul, terdapat beberapa elemen yang dirancang untuk memudahkan pembaca:

- Tabel digunakan untuk menyajikan data terstruktur, seperti matriks penilaian, kamus tagging, dan rekapitulasi hasil. Setiap tabel memiliki judul dan kolom yang jelas.
- Diagram alur (misalnya, pada proses CBT) membantu memvisualisasikan langkah-langkah secara kronologis.
- Kata kunci dalam kamus tagging dicetak tebal atau ditandai agar mudah diidentifikasi saat mencocokkan dengan uraian kegiatan.
- Contoh diberikan secara langsung di dalam teks (misalnya, pada sub bab penilaian skor) dan di lampiran untuk memperjelas penerapan.
- Catatan penting disisipkan di beberapa bagian untuk mengingatkan pembaca tentang hal-hal krusial, seperti:
 - 1) Tagging harus menempel pada struktur APBD resmi (SIPD).
 - 2) Tagging dilakukan pada level output (sub-kegiatan), bukan pada level program.
 - 3) Jika data lokasi atau output tidak tersedia, gunakan alternatif penilaian yang telah dijelaskan.

3. Tips Memahami dan Menggunakan Modul Secara Efektif

- Baca secara utuh terlebih dahulu – meskipun modul ini dapat digunakan sebagai referensi berdasarkan kebutuhan, membaca keseluruhan isi akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan antar bagian.
- Gunakan kamus tagging sebagai panduan utama – saat mengidentifikasi sub-kegiatan, buka kamus yang sesuai dengan OPD yang bersangkutan untuk menemukan kata kunci yang relevan.
- Latih dengan contoh – sebelum menerapkan pada data riil, cobalah menilai beberapa sub-kegiatan dari contoh yang disediakan untuk memastikan pemahaman Anda tentang pemberian skor dan penentuan tag.
- Libatkan tim – proses tagging sebaiknya dilakukan secara kolaboratif. Diskusikan setiap penilaian dengan rekan dari OPD lain untuk menghindari interpretasi yang terlalu subjektif.
- Dokumentasikan keputusan – catat alasan di balik setiap skor dan tag yang diberikan. Hal ini penting untuk verifikasi dan evaluasi di masa mendatang.
- Sesuaikan dengan kondisi daerah – meskipun modul ini disusun berbasis pengalaman di Kabupaten Siak dan Pelalawan, prinsip dan metodenya dapat diadaptasi untuk daerah lain dengan menyesuaikan isu strategis dan indikator lokal.

Modul ini dirancang untuk menjadi alat yang praktis, fleksibel, dan mudah dipahami. Dengan memahami struktur dan cara membaca setiap bagian, pengguna dapat mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengukur kontribusi APBD terhadap lanskap lestari secara sistematis. Penggunaan modul secara konsisten akan menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
CARA MEMAHAMI MODUL INI.....	2
DAFTAR ISI.....	6
A. PENDAHULUAN.....	6
A.1 Landasan Pemikiran.....	6
A.2. Ruang Lingkup.....	7
A.3. Tujuan.....	7
A.4 Sasaran Pengguna Modul.....	8
B. KONSEP DASAR LANSKAP LESTARI	9
B.1. Latar Belakang Pembangunan Lanskap Lestari.....	9
B.2. Pengertian Lanskap dan Lanskap Berkelanjutan.....	9
B.3. Prinsip-Prinsip Lanskap Lestari.....	10
B.4. Indikator Lanskap Lestari.....	10
B.5. Definisi Operasional.....	13
C. CARA MENGGUNAKAN MODUL TAGGING.....	13
C.1. Metodologi analisis tagging.....	13
C.2. Langkah-Langkah Tagging.....	14
LAMPIRAN: Kamus Tagging.....	19
LAMPIRAN: Contoh Penerapan Matriks Tagging Anggaran Lanskap Lestari.....	31
A. Panduan Penilaian Skor.....	31
B. Contoh Perhitungan Skor dan Tag.....	32
Contoh 1: Penanaman Mangrove (DLH).....	32
Contoh 2: Pembangunan Drainase Perkotaan (PUPR).....	32
Contoh 3: Penyuluhan Pertanian (Dinas Pertanian).....	33
Contoh 4: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa (PUPR).....	33
Contoh 5: Pengelolaan Sampah di TPA (DLH)	34
Contoh 6: Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPBD).....	34
Contoh 7: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).....	35
Contoh 8: Perizinan Usaha Pertanian (Dinas Pertanian).....	35
Contoh 9: Penanganan Pengaduan Lingkungan (DLH).....	36
Contoh 10: Administrasi Perkantoran (Semua OPD).....	36
C. Rekapitulasi Per Kategori Tag.....	37
D. Interpretasi Hasil.....	37

A. PENDAHULUAN

A.1. Landasan Pemikiran

Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan merupakan dua wilayah strategis di Provinsi Riau yang memiliki bentang alam penting berupa kawasan hutan, lahan gambut, daerah aliran sungai (DAS), serta kawasan budidaya yang menjadi penopang pembangunan ekonomi daerah dan sumber penghidupan masyarakat. Lanskap kedua kabupaten ini juga memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan cadangan karbon, mengatur tata air, serta mendukung pencapaian target pembangunan rendah emisi dan ketahanan iklim.

Di sisi lain, kedua wilayah masih menghadapi berbagai tantangan pengelolaan lanskap, antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), degradasi lahan gambut, deforestasi, konflik pemanfaatan ruang, tekanan terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi, serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah yang memiliki aktivitas perkebunan, kehutanan, dan sektor berbasis sumber daya alam yang cukup dominan, Kabupaten Siak dan Pelalawan memerlukan kebijakan pembangunan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup.

Pemerintah daerah telah mengalokasikan berbagai program dan kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan dan restorasi gambut, pengendalian karhutla, rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, pengembangan pertanian berkelanjutan, penguatan perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Namun, alokasi anggaran tersebut umumnya tersebar di berbagai perangkat daerah dan belum terdokumentasi dalam satu kerangka yang dapat menunjukkan secara utuh besaran investasi pemerintah daerah terhadap pembangunan lanskap lestari.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengevaluasi kontribusi APBD terhadap pencapaian tujuan pembangunan lanskap lestari. Padahal, informasi mengenai besaran dan distribusi anggaran sangat diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan, penentuan prioritas pembangunan, penguatan sinergi lintas sektor, serta mobilisasi berbagai sumber pendanaan pembangunan, termasuk pendanaan lingkungan dan iklim.

Oleh karena itu, diperlukan suatu Panduan Tagging Anggaran Lanskap Lestari sebagai instrumen yang memberikan metode dan kriteria yang sistematis untuk mengidentifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang berkontribusi terhadap pengelolaan lanskap secara berkelanjutan. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan dalam melakukan analisis anggaran secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui penerapan tagging anggaran, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai besaran investasi daerah pada berbagai aspek pembangunan lanskap, seperti perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, ketahanan iklim, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola. Informasi tersebut menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, melakukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah, hasil tagging anggaran juga diharapkan dapat memperkuat implementasi berbagai kebijakan nasional dan daerah, termasuk pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengendalian perubahan iklim, pengelolaan gambut yang berkelanjutan, implementasi Perhutanan Sosial, serta berbagai inisiatif pembangunan rendah emisi dan lanskap berkelanjutan yang sedang berkembang di Provinsi Riau. Dengan demikian, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan memiliki instrumen yang lebih efektif untuk mengukur komitmen fiskal daerah sekaligus memperkuat kolaborasi multipihak dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

A.2. Ruang Lingkup

Modul Tagging Anggaran Lanskap Lestari disusun sebagai panduan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis dukungan kebijakan serta alokasi anggaran daerah terhadap pembangunan lanskap lestari. Pendekatan yang digunakan adalah Sustainable Landscape Approach, yaitu pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan tujuan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Dalam pendekatan lanskap lestari, kontribusi terhadap pengelolaan lanskap tidak hanya berasal dari sektor lingkungan hidup atau kehutanan, tetapi juga dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pekerjaan umum, penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, hingga sektor-sektor lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan ruang, sumber daya alam, dan ketahanan masyarakat. Oleh karena itu, proses tagging dilakukan secara lintas sektor untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai komitmen fiskal pemerintah daerah.

Ruang lingkup penerapan modul ini meliputi:

1. Analisis dokumen perencanaan daerah, yaitu RPJMD, RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD, untuk mengidentifikasi arah kebijakan, sasaran, indikator kinerja, serta program pembangunan yang mendukung tujuan lanskap lestari.
2. Analisis dokumen penganggaran daerah, meliputi APBD dan dokumen pelaksanaannya, guna mengidentifikasi besaran alokasi anggaran yang mendukung pengelolaan lanskap serta mengukur komitmen fiskal pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan.
3. Identifikasi program, kegiatan, dan sub-kegiatan, yang memiliki kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap perlindungan dan pemulihan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian perubahan iklim, penguatan ekonomi masyarakat, serta tata kelola lanskap.
4. Analisis belanja daerah lintas sektor, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar perangkat daerah dalam mendukung tujuan pembangunan lanskap lestari. Analisis ini bertujuan untuk melihat sinergi, proporsi pendanaan, serta peluang penguatan kolaborasi dalam perencanaan dan penganggaran.

Melalui ruang lingkup tersebut, hasil tagging diharapkan tidak hanya menunjukkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan lanskap lestari, tetapi juga memberikan gambaran mengenai keterpaduan kebijakan, efektivitas alokasi belanja, serta kontribusi masing-masing sektor terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah.

A.3. Tujuan

Modul Tagging Anggaran Lanskap Lestari bertujuan untuk menyediakan panduan yang sistematis, praktis, dan mudah diterapkan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menganalisis program, kegiatan, subkegiatan, dan alokasi anggaran daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan lanskap lestari. Melalui modul ini, diharapkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan memiliki acuan yang sama dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu.

Secara khusus, modul ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan metodologi dan kriteria tagging yang jelas, sederhana, dan konsisten untuk mengidentifikasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, ketahanan iklim, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola lanskap.
2. Mengukur besaran komitmen fiskal pemerintah daerah terhadap pembangunan lanskap lestari melalui analisis alokasi APBD berdasarkan program, kegiatan, dan perangkat daerah yang relevan.
3. Menyediakan informasi yang akurat dan berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

4. Mengidentifikasi peluang peningkatan kualitas belanja daerah, termasuk kesenjangan pendanaan (financing gap), kebutuhan investasi, dan prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan anggaran lebih lanjut.
5. Mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan melalui penggunaan metode analisis yang seragam dalam mendukung pembangunan lanskap lestari.
6. Mendukung pencapaian target pembangunan daerah, nasional, dan global, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), pembangunan rendah emisi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan gambut berkelanjutan, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lanskap di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

A.4. Sasaran Pengguna Modul

Modul Tagging Anggaran Lanskap Lestari dirancang sebagai panduan praktis yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Pengguna modul memiliki peran yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan lanskap lestari melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sasaran pengguna modul ini antara lain:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah merupakan pengguna utama modul ini karena memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan daerah. Modul digunakan untuk:

- 1). Mengidentifikasi program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang berkontribusi terhadap pembangunan lanskap lestari;
- 2). Mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- 3). Mengukur besaran alokasi anggaran yang mendukung pengelolaan lanskap lestari pada masing-masing perangkat daerah;
- 4). Memperkuat koordinasi dan sinergi lintas OPD dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan; serta
- 5). Menyediakan data dan informasi sebagai bahan monitoring, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja pembangunan.

Secara spesifik, modul ini dapat di gunakan OPD terkait ditingkat daerah diantaranya;

- 1). Bappeda sebagai koordinator perencanaan dan integrasi lintas sektor
- 2). BPKAD/BKAD sebagai pengelolaan dan analisis belanja daerah
- 3). OPD Teknis diantaranya; Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perkebunan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penanggulangan Bencana, dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemadaman Kebakaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan dinas lainnya yang relevan.

2. Akademisi/Perguruan Tinggi

Akademisi berperan sebagai mitra ilmiah dalam pengembangan metode, analisis, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Modul ini dapat dimanfaatkan untuk:

- 1). Melakukan Kajian Mengenai Efektivitas Belanja Daerah Terhadap Pengelolaan Lanskap Lestari;
- 2). Mengembangkan Metode Analisis Kebijakan Dan Penganggaran Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy);
- 3). Mendukung Penelitian Mengenai Pembangunan Berkelanjutan, Perubahan Iklim, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dan Tata Kelola Pemerintahan; Serta
- 4). Memberikan Masukan Ilmiah Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penyempurnaan Kebijakan, Perencanaan, Dan Penganggaran.

3. Mitra Pembangunan

Mitra pembangunan, termasuk organisasi masyarakat sipil (CSO/NGO), lembaga donor, organisasi internasional, sektor swasta, dan lembaga filantropi, dapat menggunakan modul ini sebagai acuan dalam mendukung pembangunan lanskap lestari di daerah. Pemanfaatan modul meliputi:

- 1). Mengidentifikasi prioritas pendanaan dan kebutuhan investasi pembangunan lanskap lestari;
- 2). Mendukung penyusunan program kolaboratif yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah;
- 3). Melakukan pemantauan terhadap komitmen pendanaan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
- 4). Memperkuat advokasi kebijakan berbasis data dan analisis anggaran; serta
- 5). Membangun sinergi pendanaan antara APBD dengan sumber pendanaan lainnya, termasuk pendanaan perubahan iklim, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan.

4. Kolaborasi Multipihak

Modul ini dirancang untuk mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui penggunaan metode analisis yang sama dalam mengidentifikasi kontribusi anggaran terhadap pembangunan lanskap lestari. Dengan demikian, hasil tagging dapat menjadi referensi bersama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, pengalokasian anggaran, pemantauan capaian pembangunan, serta evaluasi efektivitas investasi pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan lanskap yang berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

B. KONSEP DASAR PLANSKAP LESTARI

B.1. Latar Belakang Pembangunan Lanskap Lestari

Lanskap lestari sebagai pendekatan tata kelola wilayah lahir dari kesadaran bahwa isu-isu lingkungan dan sosial di tingkat global tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan rantai pasok perusahaan. Deforestasi yang terus menjadi isu kunci dalam rantai pasok komoditas pertanian global, serta peningkatan laju deforestasi di wilayah tropis, menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terlibat dalam pasar komoditas pertanian. Kondisi ini mendorong munculnya kesadaran bahwa bekerja melampaui rantai pasok individu dan berkolaborasi di tingkat lanskap, yurisdiksi, atau sektoral dapat mengatasi isu-isu lingkungan dan sosial secara sistemik beserta akar penyebabnya. Pendekatan ini menawarkan solusi berbasis tempat (place-based solution) melalui aksi kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu program kegiatan pembangunan lanskap lestari bertujuan memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan dan memberikan dukungan penting untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk desa. Program ini juga merupakan pilihan strategis untuk menerapkan pendekatan lanskap yang bertujuan memenuhi komitmen NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation). Selaras dengan sasaran nasional melalui Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, serta sasaran inisiatif pembangun hijau di daerah sebagai bagian dari Kerangka Daya Saing Wilayah dan Rencana Aksi Daerah untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (RA-PKSB), dengan klaim sektor swasta atas komitmen NDPE sebagai salah satu indikator keberhasilan.

B.2. Pengertian Lanskap dan Lanskap Berkelanjutan

Lanskap didefinisikan sebagai suatu wilayah geografis yang terdiri dari ekosistem-ekosistem yang saling berinteraksi, mencakup kawasan hutan, lahan pertanian, permukiman, perairan, dan ekosistem lainnya yang terbentuk dari interaksi antara manusia dan lingkungan alam. Lanskap tidak hanya dipahami sebagai bentang alam fisik, tetapi juga sebagai ruang sosial, ekonomi, dan budaya di mana berbagai aktivitas manusia berlangsung dan saling mempengaruhi dengan kondisi alam di sekitarnya.

Lanskap berkelanjutan atau lanskap lestari adalah pendekatan tata kelola wilayah yang bertujuan menjadikan produksi dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan sebagai norma di suatu wilayah administratif atau ekologis. Pendekatan ini bersifat yurisdiksional dan kolaboratif, melibatkan multi-pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah kabupaten, sektor swasta, petani, dan masyarakat sipil untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui rantai pasok perusahaan perorangan. Lanskap lestari bertujuan untuk menghentikan dan membalikkan laju deforestasi serta degradasi hutan dan lahan gambut, mengurangi risiko kebakaran, menghormati hak-hak masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan komunitas lokal.

Pembangunan rendah karbon merupakan strategi pembangunan yang menekankan pada pengurangan emisi Gas Rumah Kaca melalui efisiensi energi, konservasi hutan dan gambut, penggunaan energi terbarukan, serta praktik pertanian dan industri yang ramah lingkungan. Strategi ini menjadi bagian integral dari pendekatan lanskap lestari karena sektor kehutanan, gambut, dan pertanian merupakan kontributor utama emisi GRK di tingkat daerah. Sementara itu, ketahanan iklim adalah kemampuan suatu sistem, baik ekosistem, sosial, maupun ekonomi, untuk mengantisipasi, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari dampak buruk perubahan iklim, termasuk bencana hidrometeorologi, kenaikan muka air laut, dan kekeringan. Dalam konteks lanskap lestari, ketahanan iklim menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai melalui pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

B.3. Prinsip-Prinsip Lanskap Lestari

Lanskap lestari dibangun di atas lima prinsip dasar yang saling terkait dan saling memperkuat. Prinsip pertama adalah perlindungan lingkungan hidup, yang menekankan pada upaya melindungi dan meningkatkan hutan, lahan gambut, mangrove, dan ekosistem alam lainnya sebagai penyangga kehidupan. Prinsip ini mencakup pengendalian deforestasi, rehabilitasi lahan terdegradasi, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Prinsip kedua adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang mendorong produksi dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan, dengan tetap memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Prinsip ini diwujudkan melalui pengembangan pertanian dan perkebunan berkelanjutan, ekonomi hijau, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara lestari.

Prinsip ketiga adalah kesejahteraan masyarakat, yang menekankan pada pemberdayaan petani dan komunitas sekitar untuk meningkatkan mata pencaharian mereka secara berkelanjutan. Prinsip ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas petani, peremajaan sawit rakyat, pengembangan agroforestri, dan perhutanan sosial.

Prinsip keempat adalah tata kelola yang baik, yang menjalankan tata kelola melalui perbaikan kebijakan dan rencana daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Prinsip ini mencakup pengawasan lingkungan, pengendalian pencemaran, serta penguatan data dan monitoring untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Prinsip kelima adalah inklusivitas dan partisipasi masyarakat, yang menghormati hak-hak masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat, serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

B.4. Indikator Lanskap Lestari

Untuk mengukur capaian dan efektivitas implementasi lanskap lestari, diperlukan seperangkat indikator yang terukur dan dapat diverifikasi. Indikator-indikator ini dikelompokkan ke dalam lima area utama yang mencerminkan dimensi-dimensi lanskap lestari.

1. Area Perlindungan Ekosistem

Ini mencakup empat indikator utama.

- 1). **Indikator kehutanan**, mengukur upaya perlindungan sumber daya alam dan ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan, yang fungsi regulasinya sangat esensial untuk menyediakan udara bersih, air, dan tanah yang sehat.
- 2). **Indikator rehabilitasi lahan**, mengukur upaya pemulihan ekosistem yang terdegradasi, sejalan dengan deklarasi PBB tentang Decade on Ecosystem Restoration (2021-2030) yang bertujuan menghentikan dan membalikkan degradasi ekosistem di seluruh dunia.
- 3). **Indikator konservasi biodiversitas**, mengukur upaya perlindungan flora, fauna, dan mikroorganisme sebagai bagian dari pengelolaan ekosistem berkelanjutan, mengingat ekosistem mangrove dan hutan tropis sangat penting untuk ketahanan pesisir dan penyerapan karbon.
Indikator pengendalian karhutla, mengukur upaya menurunkan emisi karbon melalui
- 4). pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim dan perlindungan ekosistem gambut.

2. Area Pengelolaan Gambut dan DAS

Ini mencakup tiga indikator utama.

- 1). **Indikator restorasi gambut**, mengukur upaya pemulihan lahan gambut yang terdegradasi, yang memakan waktu puluhan tahun dan membutuhkan pemantauan jangka panjang yang komprehensif berdasarkan kriteria dan indikator yang kuat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri LHK No. P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Indikator pengelolaan DAS, mengukur upaya pemulihan daya dukung daerah aliran sungai
- 2). sebagai langkah positif untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, pengendalian kerawanan banjir, pengaturan tata air, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Indikator pengendalian banjir, mengukur upaya pemulihan DAS dan fungsi lahan gambut sebagai penambat air dan pengendali banjir, yang harus dipertahankan melalui penilaian
- 3). kedalaman gambut dan fungsi lahan.

3. Area Pertanian dan Perkebunan Berkelanjutan

Ini mencakup tiga indikator utama.

- 1). **Indikator peremajaan sawit rakyat**, mengukur upaya konversi kebun sawit monokultur menjadi sistem agroforestri sawit melalui skema perhutanan sosial dan sertifikasi ISPO/RSPO, di mana petani kecil tersertifikasi memiliki produktivitas rata-rata 82% lebih tinggi dibandingkan petani konvensional.
- 2). **Indikator agroforestry**, mengukur upaya penerapan sistem penggunaan lahan atau usaha tani yang mengombinasikan pepohonan dengan tanaman, yang dinilai lebih ramah lingkungan sekaligus tetap memberikan nilai ekonomi bagi petani melalui peningkatan kesehatan tanah, diversifikasi sistem pertanian, dan efisiensi penggunaan air.
- 3). **Indikator pertanian ramah lingkungan**, mengukur upaya penerapan praktik pertanian regeneratif, termasuk tumpang sari, agroforestri, integrasi ternak, penggunaan pupuk organik, serta pelatihan dan penyuluhan berkelanjutan tentang Pengendalian Hama Terpadu (IPM), efisiensi pupuk, dan konservasi tanah.

4. Area Ekonomi Hijau dan Masyarakat

Ini mencakup tiga indikator utama.

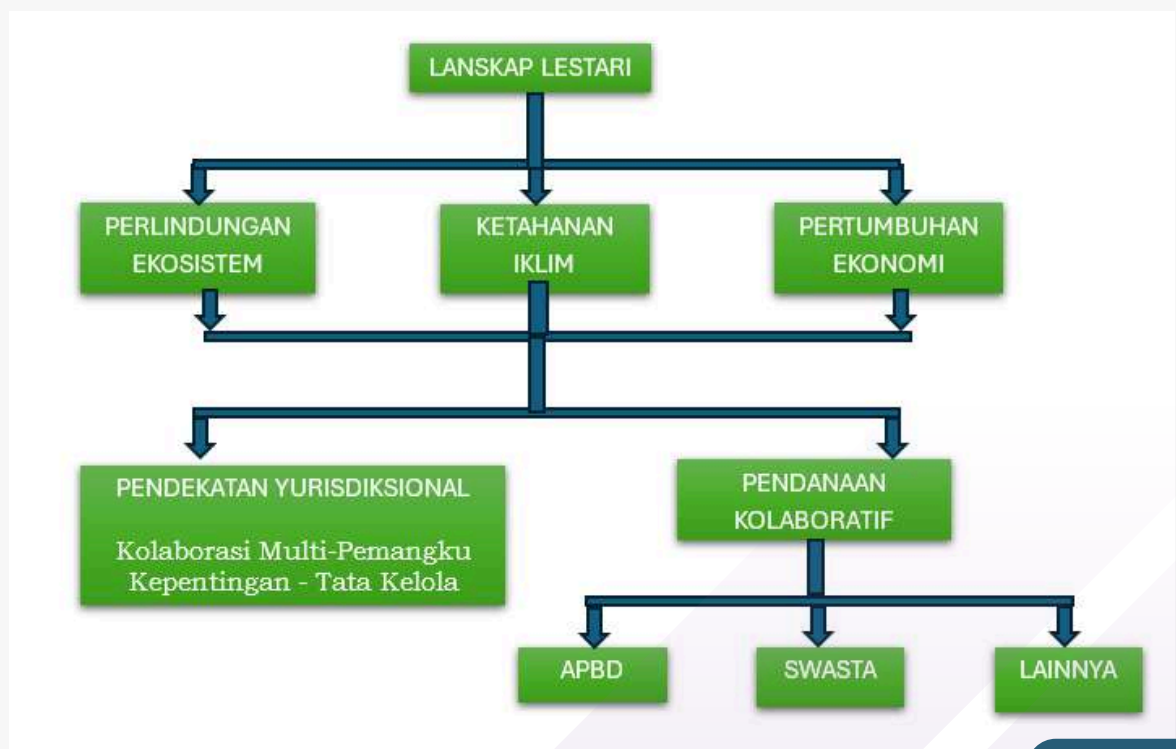
- 1). **Indikator perhutanan sosial**, mengukur upaya pembukaan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola dan memetik manfaat dari hutan secara lestari melalui pendekatan kehutanan regeneratif yang menjaga tutupan hutan sekaligus membangun nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan melalui hasil hutan bukan kayu dan agroforestri.
- 2). **Indikator UMKM berbasis hasil hutan bukan kayu**, mengukur upaya pengembangan kelompok usaha yang memanfaatkan rotan, getah kayu hutan, resin, madu, kopi, bambu, minyak atsiri, hingga jasa wisata ekowisata, yang mengintegrasikan pengelolaan dari hulu kawasan hutan hingga hilirisasi produk.
- 3). **Indikator ekowisata**, mengukur upaya keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu, budidaya tanaman obat, dan pengembangan wisata alam yang mencerminkan pergeseran paradigma pengelolaan hutan dari eksploitasi ke kolaborasi, dari ekstraktif ke produktif.

5. Area Tata Kelola Lingkungan

Ini mencakup tiga indikator utama.

- 1). **Indikator pengawasan lingkungan**, mengukur upaya penguatan Satu Data Lingkungan sebagai fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang modern, transparan, dan berkelanjutan, serta koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2). **Indikator pengendalian pencemaran**, mengukur upaya pengawasan ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air dan udara, di mana semua pembuangan air limbah harus memenuhi baku mutu dan semua sumber emisi harus diidentifikasi serta dilakukan pemantauan.
- 3). **Indikator penguatan data dan monitoring**, mengukur upaya penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang memiliki fungsi utama sebagai dasar pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), instrumen evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan, rujukan dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta sarana transparansi dan akuntabilitas kepada publik, sebagaimana diamanatkan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Lingkungan Hidup bagi pemerintahan daerah.

Gambar: 1: Kerangka Konseptual Lanskap Lestari



B.5. Definisi Operasional

1). **Tagging Anggaran**

Proses pemberian kode/label pada program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam APBD yang berkontribusi terhadap pembangunan lanskap lestari. Tagging dilakukan dengan mencocokkan uraian kegiatan terhadap kamus tagging yang telah disusun berdasarkan indikator lanskap lestari.

2). **Kamus Tagging**

Daftar kode, kategori, dan kata kunci yang digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang berkontribusi terhadap lanskap lestari. Kamus tagging disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3). **Lanskap Lestari**

Pendekatan tata kelola wilayah yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan di suatu wilayah administratif atau ekologis.

4). **Urusan**

Urusan adalah bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

5). **Program**

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program merupakan instrumen kebijakan yang mengintegrasikan berbagai kegiatan dalam satu kerangka pencapaian tujuan strategis.

6). **Kegiatan**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya (SDM, barang modal, peralatan, teknologi) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

7). **Sub kegiatan**

Sub kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) pada masing-masing urusan, serta merupakan wujud pelaksanaan urusan di daerah. Sub kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari kegiatan yang memiliki keluaran (output) yang lebih terukur dan spesifik.

8). **Output**

Output adalah hasil langsung (keluaran) dari suatu kegiatan atau sub kegiatan yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Output merupakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan setelah menggunakan sejumlah sumber daya (input)

9). **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan strategis ke dalam target-target operasional yang lebih konkret dan terukur.

10). **Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau permasalahan pembangunan yang bersifat mendesak, memiliki dampak luas, dan memerlukan penanganan prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Isu strategis menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran.

C. CARA MENGGUNAKAN MODUL TAGGING

C.1. Metodologi analisis tagging

Tagging anggaran untuk lanskap lestari menggunakan pendekatan Climate Budget Tagging (CBT), yaitu metode identifikasi, klasifikasi, dan kuantifikasi belanja publik yang berkontribusi pada aksi mitigasi dan/atau adaptasi terhadap perubahan iklim serta perlindungan ekosistem.

C.2. Langkah - Langkah Tagging

1. Penetapan OPD Terkait

Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang berkontribusi terhadap pembangunan lanskap lestari. Penetapan ini didasarkan pada kajian terhadap isu-isu strategis lanskap lestari yang telah diidentifikasi, seperti perlindungan ekosistem, pengelolaan gambut dan DAS, pertanian berkelanjutan, ekonomi hijau, dan tata kelola lingkungan. Adapun OPD-OPD yang ditetapkan meliputi:

No	OPD	Peran dalam Lanskap Lestari
1	BAPPEDA	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah, integrasi kebijakan lingkungan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD), sinkronisasi program lintas sektor
2	DLH	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan limbah B3, konservasi keanekaragaman hayati
3	PUPR	Pengelolaan sumber daya air, irigasi, penyediaan air minum, drainase, penataan ruang, infrastruktur
4	Dinas Pertanian	Pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B), penyuluhan pertanian, pengendalian OPT, kesehatan hewan dan zoonosis
5	Dinas Perkebunan	Pengelolaan perkebunan berkelanjutan, peremajaan sawit rakyat, sertifikasi ISPO/RSPO, agroforestri
6	BPBD	Penanggulangan bencana, pencegahan dan penanganan karhutla, kesiapsiagaan dan respons darurat
7	PMD	Pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan dana desa untuk lingkungan, penguatan kelembagaan desa
8	DiperindagKopUKM	Pengembangan UMKM berbasis hasil hutan bukan kayu, ekonomi kreatif, hilirisasi produk berkelanjutan
9	Dinas Pariwisata	Pengembangan ekowisata, pengelolaan wisata alam berbasis konservasi
10	BRIDA	Penelitian dan pengembangan, kajian kebijakan berbasis bukti untuk lanskap lestari
11	Damkar	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran (termasuk karhutla), penyelamatan dan evakuasi

2. Penyusunan Kamus Tagging dengan Dasar Permendagri 90 Tahun 2019

Kamus tagging adalah daftar kode dan kategori yang digunakan untuk mengidentifikasi program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam APBD yang berkontribusi terhadap lanskap lestari. Kamus ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kamus tagging memuat:

Komponen	Penjelasan
Kode Rekening	Mengacu pada kode rekening APBD yang selaras dengan Permendagri 90/2019
Nama Kategori	Kategori tag yang mencerminkan area lanskap lestari (misal: Perlindungan Ekosistem, Pengelolaan Gambut dan DAS)
Kata Kunci	Kata-kata dalam uraian kegiatan yang menjadi penanda untuk menentukan kategori tag

Proses Penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi urusan dan bidang urusan dalam Permendagri 90/2019 yang relevan dengan lanskap lestari (Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan, Urusan Perkebunan, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Penanggulangan Bencana, Urusan Perencanaan).
2. Mengelompokkan sub-kegiatan berdasarkan isu strategis dan indikator lanskap lestari yang telah ditetapkan (Perlindungan Ekosistem, Pengelolaan Gambut dan DAS, Pertanian Berkelanjutan, Ekonomi Hijau, Tata Kelola Lingkungan).
3. Menentukan kata kunci untuk setiap kategori yang akan digunakan sebagai panduan saat mencocokkan uraian kegiatan dalam APBD.
4. Menyusun kamus per OPD yang memuat kategori tag dan kata kunci spesifik untuk masing-masing OPD.

3. Penetapan Dimensi Penilaian Alokasi Belanja

Penetapan dimensi penilaian bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu sub-kegiatan dalam APBD berkontribusi terhadap lanskap lestari. Dimensi penilaian yang digunakan terdiri dari tiga aspek:

a) Dimensi Penilaian

Dimensi	Penjelasan	Bobot	Kriteria Penilaian
Indikator (LL)	Menilai sejauh mana belanja terkait dengan indikator lanskap lestari. Semakin langsung belanja mendukung pencapaian indikator lingkungan/keberlanjutan, semakin tinggi skornya.	3	Belanja secara langsung dan jelas terkait dengan indikator utama lanskap lestari (misal: indikator luasan mangrove, kualitas air, pengurangan emisi GRK, luas lahan gambut terlindungi)
		2	Belanja terkait secara tidak langsung dengan indikator lanskap lestari (misal: indikator kapasitas petani, jumlah dokumen perencanaan yang mengakomodasi lingkungan, jumlah masyarakat teredukasi)
		1	Belanja hanya terkait secara marginal/administratif dengan indikator lanskap lestari (misal: indikator jumlah rapat koordinasi, jumlah laporan internal, jumlah izin yang diterbitkan)
		0	Belanja tidak terkait sama sekali dengan indikator lanskap lestari (misal: indikator jumlah gaji, jumlah ATK, jumlah pemeliharaan kantor)

Output	Menilai kualitas dan keterukuran output kegiatan yang dihasilkan	3	Output berupa hasil fisik/konkret di lapangan dengan satuan terukur yang secara langsung mendukung indikator (misal: km, ha, unit, ton)
		2	Output berupa hasil non-fisik tetapi konkret dan berdampak tidak langsung pada indikator (misal: jumlah orang terlatih, jumlah dokumen kebijakan)
		1	Output berupa hasil administratif/koordinasi yang hanya mendukung proses internal (misal: jumlah surat, jumlah notulen)
		0	Tidak ada output yang relevan atau output bersifat internal (misal: kegiatan operasional kantor)
Sub Kegiatan	Menilai relevansi jenis aktivitas/sub-kegiatan terhadap lanskap lestari (sebagai pengganti lokasi)	3	Sub-kegiatan berisi intervensi fisik langsung di lapangan atau secara eksplisit menangani isu strategis (misal: penanaman, pembangunan fisik, restorasi, pemadaman karhutla)
		2	Sub-kegiatan berisi intervensi fasilitatif, koordinasi, atau pemberdayaan yang berdampak tidak langsung namun penting (misal: penyuluhan, pendampingan, perencanaan, surveilans)
		1	Sub-kegiatan berisi intervensi administratif/perizinan yang hanya marginal mendukung lanskap (misal: penerbitan izin, penyusunan laporan internal)
		0	Sub-kegiatan bersifat operasional murni tanpa kaitan dengan lanskap (misal: pengadaan ATK, pemeliharaan kantor)

b) Range Persentase

Range Total Skor	Persentase Belanja Lingkungan	Keterangan
7 - 9	100%	Sangat Relevan
4 - 6	70%	Cukup Relevan
1 - 3	20%	Kurang Relevan
0	0%	Tidak Relevan

4. Penelusuran Belanja Daerah Berdasarkan Kamus Tagging untuk Masing-Masing OPD Terkait

Penelusuran belanja daerah dilakukan dengan mencocokkan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam dokumen APBD dengan kamus tagging yang telah disusun. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi alokasi anggaran yang mendukung lanskap lestari.

Tahapan Penelusuran:

- Mengumpulkan dokumen APBD tahun berjalan dan dokumen pelaksanaannya (DPA-SKPD) dari masing-masing OPD terkait.
- Mengidentifikasi sub-kegiatan yang relevan dengan lanskap lestari menggunakan kata kunci dalam kamus tagging.
- Mencatat kode rekening, uraian, dan anggaran dari setiap sub-kegiatan yang teridentifikasi.
- Menentukan kategori tag untuk setiap sub-kegiatan berdasarkan kamus tagging.
- Menghitung total anggaran per kategori tag per OPD untuk mengetahui besaran investasi daerah pada setiap area lanskap lestari.

5. Penentuan Skor dan Persentase Belanja Mendukung Lanskap Lestari

Setelah sub-kegiatan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan skor untuk setiap dimensi penilaian (I, O, S) dan menghitung persentase belanja yang benar-benar berkontribusi terhadap lanskap lestari.

Proses Penentuan Skor:

- Memberikan skor untuk dimensi Indikator (I) berdasarkan keterkaitan belanja dengan indikator lanskap lestari (skor 0-3).
- Memberikan skor untuk dimensi Output (O) berdasarkan kualitas dan keterukuran output kegiatan (skor 0-3).
- Memberikan skor untuk dimensi Sub Kegiatan (S) berdasarkan jenis intervensi aktivitas (skor 0-3).
- Menjumlahkan ketiga skor untuk mendapatkan total skor (0-9).
- Menentukan kategori tag berdasarkan total skor (L1, L2, L3, atau N).
- Menghitung nilai lingkungan dengan mengalikan total anggaran dengan persentase belanja lingkungan yang sesuai.

6. Interpretasi dan Analisis

Interpretasi dan analisis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hasil tagging anggaran serta implikasinya terhadap pembangunan lanskap lestari.

Aspek yang Dianalisis:

No	Aspek Analisis	Penjelasan
1	Total Nilai Lingkungan	Menghitung total anggaran yang benar-benar berkontribusi terhadap lanskap lestari dari seluruh OPD
2	Persentase Anggaran Lingkungan	Membandingkan nilai lingkungan dengan total APBD untuk mengetahui komitmen fiskal daerah
3	Distribusi per OPD	Mengidentifikasi OPD mana yang memiliki kontribusi terbesar terhadap lanskap lestari
4	Distribusi per Area	Mengidentifikasi area mana (Perlindungan Ekosistem, Gambut, Pertanian, Ekonomi Hijau, Tata Kelola) yang paling banyak mendapat alokasi
5	Distribusi per Kategori Tag	Mengetahui proporsi belanja dengan relevansi tinggi (L1), sedang (L2), rendah (L3), dan tidak relevan (N)
6	Kesenjangan Pendanaan	Membandingkan alokasi yang ada dengan kebutuhan ideal untuk mengidentifikasi kekurangan pendanaan
7	Trend Tahunan	Membandingkan hasil tagging antar tahun untuk melihat peningkatan atau penurunan komitmen

Contoh Analisis:

- Total anggaran yang dianalisis: Rp 44.325.000.000
- Nilai lingkungan: Rp 29.002.500.000 (65,5%)
- Kontribusi terbesar: DLH (40%), PUPR (35%)
- Area dominan: Perlindungan Ekosistem (45%), Pengelolaan Sampah (25%)
- Kesenjangan: Area Ekonomi Hijau dan Perhutanan Sosial hanya mendapat 5% dari total anggaran lingkungan, padahal memiliki potensi besar untuk pengembangan.

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil interpretasi dan analisis untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kontribusi APBD terhadap lanskap lestari. Komponen Kesimpulan:

No	Komponen	Penjelasan
1	Ringkasan Hasil	Menyajikan secara ringkas temuan utama dari analisis tagging anggaran
2	Identifikasi Kekuatan	Mengidentifikasi area dan OPD yang sudah memiliki komitmen tinggi
3	Identifikasi Kelemahan	Mengidentifikasi area dan OPD yang masih rendah kontribusinya
4	Kesenjangan Prioritas	Menyimpulkan kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan prioritas
5	Rekomendasi Kebijakan	Memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran
6	Tindak Lanjut	Menyusun rencana tindak lanjut untuk implementasi rekomendasi

Contoh Kesimpulan:

1. **Komitmen Fiskal:** Kabupaten Siak telah mengalokasikan 65,5% dari total belanja yang dianalisis untuk mendukung lanskap lestari, menunjukkan komitmen yang cukup baik terhadap pembangunan berkelanjutan.
2. **Prioritas Anggaran:** Area Perlindungan Ekosistem dan Pengelolaan Persampahan mendapat prioritas tertinggi, sementara area Ekonomi Hijau dan Perhutanan Sosial masih sangat rendah.
3. **Rekomendasi:**
 - Meningkatkan alokasi untuk perhutanan sosial dan pengembangan UMKM berbasis hasil hutan bukan kayu.
 - Memperkuat koordinasi lintas OPD dalam perencanaan dan penganggaran berbasis lanskap.
 - Mengunci minimal 30% APBD untuk program-program yang mendukung lanskap lestari.
 - Mengintegrasikan hasil tagging ke dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya (RKPD, Renja OPD).
4. **Tindak Lanjut:** Perlu dilakukan sosialisasi hasil tagging kepada seluruh OPD dan DPRD, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk penganggaran tahun mendatang.

LAMPIRAN 1: Kamus Tagging

1. Dinas Lingkungan Hidup

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Taman Kehati, Kebun Raya, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengelolaan Tanah Kosong, Penatagunaan Tanah, Izin Membuka Tanah
	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Mitigasi, Adaptasi Perubahan Iklim, Pengurangan Emisi
	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Pengurangan Sampah, Pendaauran Ulang, Pengelolaan Persampahan, TPA/TPST/SPA, Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3
	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pencegahan Pencemaran (tanah, air, udara, laut), Penanggulangan Pencemaran, Pengisolasian, Penghentian Pencemaran
	Pemulihan Lingkungan (Restorasi/Rehabilitasi)	Remediasi, Rehabilitasi, Restorasi, Pembersihan Unsur Pencemar
	Perencanaan Lingkungan Berkelanjutan	RPPLH, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pengelolaan Kehati, Perencanaan Penggunaan Tanah
	Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan, Pengawasan Usaha/Kegiatan, Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Kelembagaan dan Kapasitas SDM Lingkungan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas SDM, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kemitraan, Pendampingan
	Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, Pemberdayaan MHA, Penguatan Kelembagaan MHA
	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas SDM untuk Lembaga Masyarakat, Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, Pendidikan Lingkungan
	Penghargaan dan Promosi Lingkungan	Penghargaan Lingkungan Hidup, Penilaian Kinerja Masyarakat/Dunia Usaha/Pendidikan dalam Perlindungan Lingkungan
	Penanganan Pengaduan Lingkungan	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup
	Tata Ruang dan Lanskap Lestari	Pengakuan Tanah Ulayat, Penetapan Tanah Ulayat, Inventarisasi Tanah Kosong, Pemetaan Zona Nilai Tanah, Konsolidasi Tanah

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Berkelanjutan	Pengelolaan SDA, bangunan pengaman pantai, rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan/embung/bangunan penampung air, air tanah, air baku, pengendali banjir, lahar, drainase utama, pengaman pantai, pola dan rencana pengelolaan SDA, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan bendungan, embung, sumur air tanah, unit air baku, tanggul sungai, perkuatan tebing, pintu air, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/kolam retensi, sabo, check dam, breakwater, seawall, flood forecasting and warning system, normalisasi/restorasi/pemeliharaan sungai, perlindungan mata air
	Konservasi Air dan Ekosistem Rawa	Konservasi kawasan rawa, koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan kawasan rawa, pengelolaan hidrologi dan kualitas air, revitalisasi dan pemeliharaan danau
	Pengelolaan Irigasi Berkelanjutan	Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder (luas <1000 ha), rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk irigasi dan rawa, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, irigasi rawa, irigasi tambak, irigasi air tanah, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi
	Penyediaan Air Minum dan Perlindungan Sumber Air	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM perkotaan/perdesaan, operasi dan pemeliharaan SPAM, pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM
	Pengelolaan Persampahan Ramah Lingkungan	Sistem pengelolaan persampahan regional, TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan TPA, penyediaan sarana persampahan, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan teknik pengelolaan persampahan
	Pengelolaan Air Limbah Domestik Berkelanjutan	Sistem pengelolaan air limbah domestik, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem air limbah, penyediaan sarana, pembinaan teknik, sosialisasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan SDM dan kelembagaan, operasi dan pemeliharaan
	Drainase Perkotaan Lestari	Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, rencana teknis drainase perkotaan, outline plan kawasan genangan, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan, operasi dan pemeliharaan sistem drainase

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan	Penetapan RTRW dan RRTR kab/kota, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang, peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang, sistem informasi penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pemberian insentif/disinsentif, penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Lestari	Penataan bangunan dan lingkungannya, rencana kebijakan strategis, supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan bangunan dan lingkungan
	Pengembangan Permukiman Berkelanjutan	Infrastruktur kawasan permukiman, pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman, pemanfaatan dan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian, pembinaan penyelenggaraan
	Penanganan Permukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni	Penataan kawasan permukiman kumuh (luas <10 ha), survei dan penetapan lokasi kumuh, pencegahan tumbuh dan berkembangnya kumuh, pembinaan kelompok swadaya masyarakat, perbaikan rumah tidak layak huni, peremajaan/pemugaran, pemberian bantuan uang sewa sementara
	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Hijau	Perencanaan dan penyediaan PSU perumahan, penyediaan prasarana, sarana, utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian yang lestari
	Kelembagaan dan Kapasitas SDM Infrastruktur Hijau	Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA, koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan, operasional unit pengelola irigasi, pengembangan SDM dan kelembagaan SPAM, pengembangan SDM dan kelembagaan air limbah, pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi, penguatan BLU/BUMD, pembentukan tim satgas/fasilitator, pelatihan tenaga terampil konstruksi
	Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penanggulangan bencana/tanggap darurat, relokasi rumah korban bencana, identifikasi rumah di lokasi rawan bencana, rehabilitasi rumah korban bencana, pembangunan rumah khusus korban bencana, normalisasi sungai, polder/kolam retensi, flood forecasting and warning system, bangunan sabo/check dam, breakwater/seawall (adaptasi kenaikan muka air laut)

3. Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Kajian dan Perencanaan Risiko Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Risiko Bencana, Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana
	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Pascabencana, Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
	Penanganan Darurat dan Evakuasi Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas, Respon Cepat Darurat Bencana, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi
	Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana, Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Karhutla)	Pencegahan Kebakaran, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran
	Inspeksi dan Penilaian Sarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran, Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

4. Dinas Pertanian/Perkebunan

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), penyusunan peta LP2B, masterplan pengembangan prasarana/sarana/kawasan/komoditas perkebunan
	Konservasi Sumber Daya Genetik Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, mikro organisme, penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG, peningkatan kualitas SDG, pemanfaatan SDG, pelestarian wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
	Prasarana Pertanian Ramah Lingkungan	Pengembangan prasarana pertanian, koordinasi prasarana pendukung pertanian, pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, embung pertanian, jalan usaha tani, DAM parit, long storage, pintu air.
	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum, pengelolaan lahan penggembalaan umum, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim pada Pertanian	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, perkebunan; pencegahan dan penanganan kebakaran lahan; pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
	Pengurangan Risiko Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis, penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan
	Kesehatan Hewan dan Zoonosis Berkelanjutan	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, pembebasan penyakit hewan menular, penanggulangan daerah wabah, penjaminan kesehatan hewan, pengawasan pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan, pemeriksaan kesehatan hewan di perbatasan

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Kesejahteraan Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Penerapan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pendampingan unit kesejahteraan hewan, penanganan pelanggaran, pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) untuk Lanskap Lestari	Pengelolaan TAHURA kabupaten/kota, pencegahan/penanggulangan/pembatasan kerusakan kawasan, pengamanan kawasan, pengawetan tumbuhan/satwa/habitat, pengawetan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, kerja sama penyelenggaraan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sekitar, pengelolaan daerah penyangga
	Penyuluhan dan Kelembagaan Petani Berkelanjutan	Pelaksanaan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan/desa, pengembangan kapasitas kelembagaan petani, penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana penyuluhan, pembentukan Badan Usaha Milik Petani
	Pengawasan Sarana Pertanian Ramah Lingkungan	Pengawasan penggunaan sarana pertanian, pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas, teknologi, spesifik lokasi

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) kab/kota dan tingkat kecamatan, koordinasi pelaksanaan Musrenbang, koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
	Integrasi Kebijakan Lingkungan ke dalam Perencanaan	Pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya
	Identifikasi dan Pengelolaan Data Lingkungan	Identifikasi permasalahan pembangunan daerah (termasuk lingkungan), pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, pengamanan data informasi, pengumpulan dan analisis data pembangunan untuk perencanaan
	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Hijau	Koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah, analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Lingkungan	Monitoring program dan kegiatan perangkat daerah (termasuk OPD lingkungan), evaluasi capaian program/kegiatan terkait SPM (termasuk lingkungan), evaluasi capaian program/kegiatan perangkat daerah, penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah
	Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam (RPJPD, RPJMD, RKPD)
	Perencanaan Bidang Perekonomian Berbasis Ekologi	Koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (yang terkait dengan SDA dan ekonomi hijau)
	Perencanaan Infrastruktur Ramah Lingkungan	Koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air dan lingkungan hidup, bidang kebinamargaan (jalan/jembatan) dan perhubungan, bidang keciptakarya (Cipta Karya) dan kewilayahan

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok	Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok, pengendalian ketersediaan barang, pemantauan harga dan stok, operasi pasar, pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi
	Pengembangan Usaha dan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi, pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan, penyediaan sarana distribusi perdagangan
	Penguatan Industri dan Kewilayahan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan industri, koordinasi perencanaan pembangunan sumber daya industri, koordinasi perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri, koordinasi pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri
	Pengelolaan Sistem Informasi dan Data Industri	Koordinasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data sistem informasi industri nasional, diseminasi dan publikasi data informasi industri
	Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah, koordinasi pengawasan pelaksanaan IUI

7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berbasis Potensi Lokal	Pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro, pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro
	Pengembangan UMKM Menuju Skala Usaha Kecil	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standardisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
	Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, penyusunan rencana umum penanaman modal daerah, penyediaan peta potensi dan peluang usaha, penyusunan strategi promosi penanaman modal, pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem OSS, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal

8. Dinas Pariwisata

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Ekowisata dan Destinasi Wisata Berkelanjutan	Pengembangan Daya Tarik Wisata, Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata, Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata, Penetapan Destinasi Pariwisata, Perencanaan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata
	Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Sumber Daya Alam	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata yang berbasis alam, Pengembangan destinasi wisata alam, Penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kawasan wisata
	Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif, Fasilitasi Proses Kreasi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Pariwisata, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif
	Promosi dan Pemasaran Pariwisata Berkelanjutan	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya, Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata, Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata
	Pengelolaan Investasi dan Usaha Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata, Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pengelolaan Investasi Pariwisata

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Kode Tagging	Nama Kategori	Kata Kunci dalam Uraian Kegiatan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat, Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	Fasilitasi Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD, Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa
	Fasilitasi Penyusunan Profil dan Evaluasi Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
	Fasilitasi Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

LAMPIRAN: CONTOH PENERAPAN MATRIKS TAGGING ANGGARAN LANSKAP LESTARI

A. Panduan Penilaian Skor

Setiap sub-kegiatan dinilai berdasarkan tiga dimensi dengan skor 0-3:

Skor	Dimensi I (Indikator)	Dimensi O (Output)	Dimensi S (Sub Kegiatan)
3	Belanja secara langsung dan jelas terkait dengan indikator utama lanskap lestari (misal: indikator luasan mangrove, kualitas air, pengurangan emisi GRK, luas lahan gambut terlindungi)	Output berupa hasil fisik/konkret di lapangan dengan satuan terukur yang secara langsung mendukung indikator (misal: km, ha, unit, ton)	Sub-kegiatan berisi intervensi fisik langsung di lapangan atau secara eksplisit menangani isu strategis (misal: penanaman, pembangunan fisik, restorasi, pemadaman karhutla)
2	Belanja terkait secara tidak langsung dengan indikator lanskap lestari (misal: indikator kapasitas petani, jumlah dokumen perencanaan yang mengakomodasi lingkungan, jumlah masyarakat teredukasi)	Output berupa hasil non-fisik tetapi konkret dan berdampak tidak langsung pada indikator (misal: jumlah orang terlatih, jumlah dokumen kebijakan)	Sub-kegiatan berisi intervensi fasilitatif, koordinasi, atau pemberdayaan yang berdampak tidak langsung namun penting (misal: penyuluhan, pendampingan, perencanaan, surveilans)
1	Belanja hanya terkait secara marginal/administratif dengan indikator lanskap lestari (misal: indikator jumlah rapat koordinasi, jumlah laporan internal, jumlah izin yang diterbitkan)	Output berupa hasil administratif/koordinasi yang hanya mendukung proses internal (misal: jumlah surat, jumlah notulen)	Sub-kegiatan berisi intervensi administratif/perizinan yang hanya marginal mendukung lanskap (misal: penerbitan izin, penyusunan laporan internal)
0	Belanja tidak terkait sama sekali dengan indikator lanskap lestari (misal: indikator jumlah gaji, jumlah ATK, jumlah pemeliharaan kantor)	Tidak ada output yang relevan atau output bersifat internal (misal: kegiatan operasional kantor)	Sub-kegiatan bersifat operasional murni tanpa kaitan dengan lanskap (misal: pengadaan ATK, pemeliharaan kantor)

B. Contoh Perhitungan Skor dan Tag

Contoh 1: Penanaman Mangrove (DLH)

Data Kegiatan:

- OPD : Dinas Lingkungan Hidup
- Sub-kegiatan : Penanaman Mangrove
- Lokasi : Pesisir Siak (kawasan prioritas mangrove)
- Anggaran : Rp 2.500.000.000
- Output : 50 ha mangrove ditanam

Penilaian Skor:

Dimensi	Skor	Alasan
I (Indikator)	3	Indikator luasan mangrove yang ditanam secara langsung mengukur perlindungan ekosistem pesisir
O (Output)	3	Output berupa penanaman mangrove secara langsung memberikan manfaat ekosistem, terukur dalam ha
S (Sub Kegiatan)	3	Sub-kegiatan berisi intervensi fisik langsung di lapangan (penanaman mangrove)

Total Skor: 9

Kategori Tag: L1 (Sangat Relevan) → 100%

Contoh 2: Pembangunan Drainase Perkotaan (PUPR)

Data Kegiatan:

- OPD : Dinas PUPR
- Sub-kegiatan : Pembangunan Drainase Perkotaan
- Lokasi : Kawasan Perkotaan Siak
- Anggaran : Rp 5.000.000.000
- Output : 3 KM Drainase Terbangun

Penilaian Skor:

Dimensi	Skor	Alasan
I (Indikator)	2	Membantu adaptasi perubahan iklim (pengendalian banjir) namun indikatornya tidak langsung terkait konservasi
O (Output)	3	Output fisik berupa drainase terbangun dengan satuan km yang terukur
S (Sub Kegiatan)	3	Sub-kegiatan berisi intervensi fisik langsung di lapangan (pembangunan infrastruktur)

Total Skor: 8

Kategori Tag: L1 (Sangat Relevan) → 100%

Contoh 3: Penyuluhan Pertanian (Dinas Pertanian)

Data Kegiatan:

- OPD : Dinas Pertanian
- Sub-kegiatan : Penyuluhan Pertanian
- Lokasi : Seluruh kecamatan di Kabupaten Siak
- Anggaran : Rp 450.000.000
- Output : 500 petani menerima penyuluhan praktik pertanian baik

Penilaian Skor:

Dimensi	Skor	Alasan
I (Indikator)	2	Mendukung pertanian berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas petani, namun indikatornya tidak langsung
O (Output)	2	Output berupa jumlah petani terlatih, konkret namun non-fisik
S (Sub Kegiatan)	2	Sub-kegiatan berisi intervensi fasilitatif/pemberdayaan (penyuluhan)

Total Skor: 6

Kategori Tag: L2 (Cukup Relevan) → 70%

Contoh 4: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa (PUPR)

Data Kegiatan:

- OPD : Dinas PUPR
- Sub-kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
- Lokasi : Kawasan gambut Siak
- Anggaran : Rp 8.000.000.000
- Output : 15 km jaringan irigasi rawa dipelihara

Penilaian Skor:

Dimensi	Skor	Alasan
I (Indikator)	3	Mendukung pengelolaan lahan gambut berkelanjutan melalui pemeliharaan fungsi hidrologi
O (Output)	2	Output pemeliharaan menjaga fungsi hidrologi namun tidak ekspansif (pemeliharaan, bukan pembangunan baru)
S (Sub Kegiatan)	3	Sub-kegiatan berisi intervensi fisik langsung di lapangan (pemeliharaan infrastruktur)

Total Skor: 8

Kategori Tag: L1 (Sangat Relevan) → 100%

Contoh 5: Pengelolaan Sampah di TPA (DLH)

Data Kegiatan:

- OPD : Dinas Lingkungan Hidup
- Sub-kegiatan : Pengelolaan Sampah di TPA
- Lokasi : TPA Siak
- Anggaran : Rp 12.000.000.000
- Output : 500 ton/hari sampah terkelola

Penilaian Skor:

Dimensi	Skor	Alasan
I (Indikator)	3	Indikator jumlah sampah terkelola secara langsung mengukur pengurangan pencemaran dan emisi
O (Output)	3	Output fisik berupa tonase sampah yang terkelola, terukur dan konkret
S (Sub Kegiatan)	3	Sub-kegiatan berisi intervensi fisik langsung di lapangan (pengelolaan sampah)

Total Skor: 9

Kategori Tag: L1 (Sangat Relevan) → 100%

Contoh 6: Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPBD)

Data Kegiatan:

- OPD : BPBD
- Sub-kegiatan : Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
- Lokasi : Kawasan rawan karhutla Pelalawan
- Anggaran : Rp 750.000.000
- Output : 10 desa mendapatkan sosialisasi dan pembentukan relawan karhutla

Penilaian Skor:

Dimensi	Skor	Alasan
I (Indikator)	3	Indikator pencegahan karhutla secara langsung mendukung perlindungan gambut dan pengurangan emisi
O (Output)	2	Output sosialisasi dan kesiapsiagaan, konkret namun non-fisik
S (Sub Kegiatan)	3	Sub-kegiatan berisi intervensi langsung di lapangan dan menangani isu strategis karhutla

Total Skor: 8

Kategori Tag: L1 (Sangat Relevan) → 100%

Contoh 7: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Data Kegiatan:

- OPD : BAPPEDA
- Sub-kegiatan : Koordinasi Penyusunan RKPD
- Lokasi : Kabupaten Pelalawan
- Anggaran : Rp 350.000.000
- Output : 1 dokumen RKPD yang mengintegrasikan isu lingkungan

Penilaian Skor:

Dimensi	Skor	Alasan
I (Indikator)	2	Mendukung integrasi lingkungan dalam perencanaan (tidak langsung terhadap indikator lingkungan)
O (Output)	2	Output dokumen perencanaan, efek jangka panjang namun tidak langsung
S (Sub Kegiatan)	2	Sub-kegiatan berisi intervensi perencanaan/kebijakan

Total Skor: 6

Kategori Tag: L2 (Cukup Relevan) → 70%

Contoh 8: Perizinan Usaha Pertanian (Dinas Pertanian)

Data Kegiatan:

- OPD : Dinas Pertanian
- Sub-kegiatan : Penilaian Kelayakan Izin Usaha Pertanian
- Lokasi : Kabupaten Pelalawan
- Anggaran : Rp 200.000.000
- Output : 50 izin usaha diperiksa kelayakannya

Penilaian Skor:

Dimensi	Skor	Alasan
I (Indikator)	2	Mendukung pengawasan usaha namun tidak langsung terhadap indikator lingkungan
O (Output)	2	Output perizinan, kontrol terhadap praktik usaha secara administratif
S (Sub Kegiatan)	1	Sub-kegiatan berisi intervensi administratif/perizinan yang hanya marginal mendukung lanskap

Total Skor: 5

Kategori Tag: L2 (Cukup Relevan) → 70%

Contoh 9: Penanganan Pengaduan Lingkungan (DLH)

Data Kegiatan:

- OPD : Dinas Lingkungan Hidup
- Sub-kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Pencemaran Lingkungan
- Lokasi : Kabupaten Siak
- Anggaran : Rp 75.000.000
- Output : 25 pengaduan ditangani dan ditindaklanjuti

Penilaian Skor:

Dimensi	Skor	Alasan
I (Indikator)	2	Mendukung penegakan hukum lingkungan (tidak langsung terhadap indikator lingkungan)
O (Output)	2	Output penanganan kasus, konkret namun non-fisik
S (Sub Kegiatan)	1	Sub-kegiatan berisi intervensi administratif/penegakan hukum

Total Skor: 5

Kategori Tag: L2 (Cukup Relevan) → 70%

Contoh 10: Administrasi Perkantoran (Semua OPD)

Data Kegiatan:

- OPD : Semua OPD
- Sub-kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Lokasi : Kantor OPD
- Anggaran : Bervariasi
- Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan

Penilaian Skor:

Dimensi	Skor	Alasan
I (Indikator)	0	Tidak terkait dengan indikator lanskap lestari
O (Output)	0	Output administrasi tidak menghasilkan manfaat lingkungan
S (Sub Kegiatan)	0	Sub-kegiatan bersifat operasional murni tanpa kaitan dengan lanskap

Total Skor: 0

Kategori Tag: N (Tidak Relevan) → 0%

D. Rekapitulasi Per Kategori Tag

Kategori Tag	Jumlah Sub-kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Nilai Lingkungan (Rp)	Persentase dari Total
L1 (100%)	5	28.250.000.000	28.250.000.000	637%
L2 (70%)	4	1.075.000.000	752.500.000	17%
L3 (20%)	0	0	0	0%
N (0%)	1	15.000.000.000	0	338%
TOTAL	10	44.325.000.000	29.002.500.000	655%

E. Interpretasi Hasil

Berdasarkan Contoh di atas:

1. Total anggaran yang dianalisis: Rp 44.325.000.000
2. Nilai lingkungan (anggaran yang berkontribusi terhadap lanskap lestari): Rp 29.002.500.000
3. Persentase anggaran lingkungan dari total: 65,5%
4. Dominasi tag L1 (100%): Rp 28.250.000.000 atau 63,7% dari total anggaran, menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang dianalisis memiliki relevansi tinggi dengan lanskap lestari. Kegiatan-kegiatan ini umumnya berupa intervensi fisik langsung di lapangan dengan output yang terukur dan indikator yang jelas terkait dengan perlindungan ekosistem.
5. Tag L2 (70%): Rp 752.500.000 atau 1,7% dari total anggaran, terdiri dari kegiatan-kegiatan pendukung seperti penyuluhan, perencanaan, perizinan, dan penanganan pengaduan yang memiliki kontribusi signifikan namun tidak langsung terhadap lanskap lestari.
6. Kegiatan administratif (tag N) masih cukup besar (33,8%), yang umumnya merupakan belanja pegawai dan operasional kantor yang tidak memiliki kontribusi terhadap lanskap lestari.

